

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Studi gerakan petani tidak bisa dilepaskan dari sejumlah persepektif dalam menganalisa tubuh dan berkembangnya gerakan petani. Salah satunya adalah gerakan petani dari perspektif Scottian yang terinspirasi dari studi-studi yang dilakukan oleh Wolf dan Migdal. Gerakan petani dalam perspektif Scottian dikembangkan dari studi yang dia lakukan di Malaysia dimana perlawanan petani merupakan suatu gerakan tanpa organisasi formal dan dipelopori oleh para petani miskin. Perlawanan di komunikasikan secara non formal, serangan dilakukan secara diam-diam dalam skala kecil. Para petani melakukan perlawanan secara terus menerus dengan melakukan pembangkangan-pembangkangan kecil seperti terlambat datang, menghilangkan peralatan, mencuri hasil panen, tidak pernah datang dengan berbagai alasan seperti sakit, acara keluarga, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting. Karena Sebagian besar dari kehidupannya bergantung pada tanah, dalam suasana pembangunan sekarang ini kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Tanah pada dasarnya memiliki 2 arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Yaitu

---

<sup>1</sup>Abdul Wahib Situmorang, “*Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*” Cetakan II (revisi), Juli 2013, Yogyakarta, penerbit: Pustaka Pelajar, hlm 79

sebagai social asset dan capital aset. Tanah sebagai social asset adalah Sebagai sarana pengikat kesatuan dikalangan lingkungan social untuk kehidupan dan hidup, sedangkan tanah sebagai capital asset adalah sebagai modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.

Aksi-aksi kolektif dan gerakan sosial mengalami perkembangan di Indonesia. Contohnya di Indonesia gerakan demokrasi pasca Soeharto di Indonesia. Tentang politik dan gerakan para buruh dan kelompok miskin kota, gerakan petani dan upaya advokasi, gerakan pemberdayaan masyarakat local, gerakan para kelompok watchdog, gerakan keadilan gender, gerakan permajuan hak asasi manusia sebagai bagian dari gerakan pro demokrasi di Indonesia.<sup>2</sup>

Scott mengungkapkan para petani terancam kehilangan tanah, keuntungan dan situs sosial karena penetrasi modal besar yang masuk ke kampung-kampung. Kebijakan pemerintah yang pro terhadap modal besar telah menggoncang struktur sosial di desa, sehingga para petani melakukan perlawanan. Melalui organisasi formal, terstruktur , melibatkan resources besar tetapi perlawanan bentuk kecil<sup>3</sup>.

Di lingkup wilayah Indonesia terjadi gerakan protes diperoleh dikarenakan faktor dari perbudakan dan penindasan Adanya kerja paksa pada perkebunan dan

---

<sup>2</sup>Abdul Wahib Situmorang, "*Gerakan Sosial: Teori dan praktik*", cetakan II (revisi), juli 2013, Yogyakarta, penerbit: pustaka pelajar, hlm 82-83.

<sup>3</sup>\*Ibid, hlm 79-81.

pabrik-pabrik Adanya keinginan rakyat untuk mengembalikan kejayaan, kesejahteraan, ketentraman hidup seperti sebelum kedatangan para pengusaha asing, dan juga faktor pembangunan. Contoh beberapa gerakan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah yaitu yang pertama gerakan protes terkait tol pabrik semen di Rembang, kemudian yang kedua terkait gerakan protes petani tembakau akibat anjloknya harga jual di Temanggung resah.<sup>4</sup>

Di Jawa Tengah, selain permasalahan gerakan protes terkait tol pabrik semen di Rembang, yang kedua terkait gerakan protes petani tembakau akibat anjloknya harga jual di Temanggung. Berbeda halnya dengan daerah Jawa Tengah juga yaitu terkait masalah gerakan protes yang ada di Kendal yaitu masalah ganti rugi lahan warga yang terkena pembangunan akses jalan Tol Semarang-Batang.

Untuk saat ini persoalan yang dihadapi adalah ganti rugi tanah. Hanya saja penentuan harga tanah bukanlah wewenang dari tim pelaksana pembebasan tanah melainkan tugas dari tim appraisal atau penaksir harga dari kesatuan independen. puluhan petani dari Desa Wungurejo dan Tejorejo Kecamatan Ringinarum Kendal mendatangi kantor BPN Kendal di jalan Pantura Kendal. Puluhan petani ini menuntut keadilan terkait pembebasan lahan petani, yang akan dijadikan jalan tol Semarang-Batang.

Petani meminta pemerintah memberikan ganti untung, bukan ganti rugi karena lahan yang akan dilalui proyek tol ini adalah lahan produktif. Petani juga

---

<sup>4</sup>[www.Cerita.Petani.soal.Tengkulak.Tembakau.di.Temanggung - Kompas.com.html](http://www.Cerita.Petani.soal.Tengkulak.Tembakau.di.Temanggung-Kompas.com.html). diakses pada tgl 2/5/2017, pkl 13.49 wib

menolak harga ganti rugi yang diajukan pemerintah sebesar Rp 220 ribu permeternya dan meminta pemerintah tidak melakukan proses konyinasi melalui PN Kendal. Wilayah yang akan dilalui proyek tol ini berada di Kecamatan Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Ngampel, Brangsong dan Kaliwungu Selatan. Namun, dari 27 desa yang akan dilewati pembangunan jalan tol, saat ini baru dua desa yang sudah dilakukan penaksiran harga ganti rugi tanah. Yakni Desa Tegorejo dan Wungurejo, Kecamatan Ringinarum.<sup>5</sup>

Pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Semarang-Batang kembali molor. Menurut ketua tim pembebasan tanah jalan tol Semarang-Batang, Herry Fatkhurohman Kamis (2/3/2017) hingga bulan Maret pembebasan tanah yang terselesaikan baru selesai 52 persen. Menurut Herry sebenarnya sudah 60,99 persen warga setuju dengan penetapan harga. Namun, yang sudah dibayar baru 52 persen. Sekitar 92 persen warga Kendal terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Batang yang melintasi jalan tol sudah diajak musyawarah.

Menurut Herry berharap dalam waktu dekat kesepakatan harga dengan warga bisa tercapai. Sehingga pekerjaan jalan tol bisa dilaksanakan, dan lebaran bisa dilalui. Herry mengakui sesuai intruksi presiden, pembebasan lahan harusnya selesai akhir Februari. Namun, sebutnya, di Kendal masih terkendala data, seperti

---

<sup>5</sup>[www.PuluhanPetaniKendalProtesProyekTolSemarang-Batang~LIPUTANKENDALTERKINI\(OnLine\).htm](http://www.PuluhanPetaniKendalProtesProyekTolSemarang-Batang~LIPUTANKENDALTERKINI(OnLine).htm). metrojateng.com/MJ-01, diakses pada tgl 2/5/2017, pk1 14.15 WIB

misal masalah waris, hingga surat tanah yang hilang. Sehingga pembebasan tanah menjadi molor. Kalau data lengkap, pembayaran akan cepat dilakukan.<sup>6</sup>

Belasan warga desa Wungurejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, sabtu sore (27/5/2017) sore menggelar aksi teaterikal di lokasi pembangunan jalan tol Batang Semarang. Hak-hak mereka di ambil oleh mafia tanah, sementara pemerintah daerah lepas tangan. Dalam aksinya, mereka memasang poster dan spanduk di dekat lokasi pembangunan jalan tol Batang-Semarang, yang melewati Desa Wungurejo. Sementara itu, lahan pertanian tersebut sudah di eksekusi dan diuruk tanah, selasa 9 Mei 2017 oleh Waskita Karya dan Pejabat pembuat komitmen Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang. Eksekusi dilakukan setelah turun putusan dari Mahkamah Agung dan warga dipanggil oleh Pengadilan Negeri Kendal.

Perkembangan masalahnya sampai saat ini belum terselesaikan, malahan menuju ke proses pengadilan Negeri, sudah ada perkembangan, sudah ada sebagian pihak keterkaitan lahan yang terkena lahan jalan tol sudah melakukan pembayaran. Masalahnya lagi masyarakat desa Wungurejo yang terkena jalan tol pembayaran atau pelunasan lahan di bilang cukup murah di banding warga desa yang lain yang terkena lahan jalan tol. Selain di Desa wungurejo yang melakukan protes, terdapat Desa Tejorejo kecamatan Ringinarum juga melakukan aksi protes,

---

<sup>6</sup>[www.Pembebasan Lahan Jalan Tol di Kendal Kembali Molor - Kompas.com.htm](http://www.Pembebasan Lahan Jalan Tol di Kendal Kembali Molor - Kompas.com.htm). diakses pada tgl 2/5/2017, pkl 14.25 wib

tetapi gerakan protes yang terjadi di Desa Tejorejo tidak sampai menuju ke ranah Pengadilan Negeri, dan sudah terselesaikan masalahnya sama dengan kasus yang di timpa warga Desa Wungurejo kecamatan Ringinarum.

Dari fenomena di atas penulis ingin meneliti lebih jauh tentang gerakan protes petani Kendal, terkait lahan yang terkena akses jalan tol tidak sesuai yang di harapkan oleh masyarakat. Dan berbeda pembayaran yang sama halnya terkena akses jalan di bilang cukup mahal, jika di bandingkan dengan lahan yang ada di desa Wungurejo. masalah pembayaran lahan tol dan masalah yang terkendala di dalam jalan tol.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana gerakan protes masyarakat petani Desa Wungurejo kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal terhadap pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang Tahun 2016 ?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Mengenai gerakan protes masyarakat di desa Wungurejo kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal

dalam pembebasan lahan pembangunan jalan tol Semarang-Batang Tahun 2106.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini dirancang dan dikerjakan dengan harapan dapat bermanfaat bagi dunia akademik, untuk dapat berkontribusi dalam pengayaan kajian tentang Gerakan Protes Masyarakat Petani Desa Wungurejo, kecamatan Ringinarum, kabupaten Kendal dalam pembebasan lahan pembangunan jalan tol Semarang-Batang tahun 2016. Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi salah satu rujukan tambahan pengetahuan dari informasi serta bahan belajar bagi pihak-pihak yang tertarik dalam kejadian gerakan sosial maupun dalam mengambil kebijakan.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **I. Gerakan Sosial**

##### **1.1 Definisi Gerakan Sosial menurut para Ahli**

Menurut Kurniawan, J Lutfi dan Hesti Puspito Sari Gerakan Sosial adalah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagai aksi kolektif, baik untuk mendukung dan atau menentang keberlakuan suatu nilai atau norma tertentu,

maka proses bekerjanya gerakan sosial harus bertumpu kepada daya intelektualitas yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut. (2012:84)<sup>7</sup>

Menurut Prof. Jerome Davis dalam Kuriawan, Lutfi J. dan Hesti Puspito Sari (2012:115) Gerakan sosial adalah muncul sebagai reaksi atas sekumpulan individu maupun kelompok yang tidak puas terhadap kondisi kehidupan sosial yang terjadi. Ada Semacam ketamakan hidup yang bisa menyebabkan perpecahan sosial dan mental, maka gerakan sosial ini berkembang dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan.<sup>8</sup>

Gerakan Sosial menurut Iwan Gardonoo Suatmiko diartikan sebagai sebetuk aksi kolektif dengan orientasi konflikktual yang elas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama.<sup>9</sup>

Gerakan Sosial menurut Romo Mangun adalah Pinsip Solidaritas sebagai paradigma baru yang muncul sebagai masalah-masalah sosial yang ada di dunia dengan solidaritas dalam yesus kristus sebagai landasan dan pendekatan terhadap masalah-masalah yang dalam pengakuan dan penerimaan prinsip-prinsip lain seperti hak asasi manusia, harkat martabat, pemihakan, keadilan kepada kaum

---

<sup>7</sup> Suryani Amin, *Gerrakan Sosial, Gerakan petani dalam sejarah lokal di Kabupaten Batang*, 2008, hal 33

<sup>8</sup>*Ibid*, hal 54

<sup>9</sup>Darmawan Triwibowo, *Gerakan Sosial Wahana Civil Society Bagi Demokrasi*, Pustaka Indonesia, Hal xvi

miskin dalam subsidiaritas dan lain-lain, paradigma menginspirasi dan menyemangati dalam keyakinannya.<sup>10</sup>

Menurut Macionis Gerakan sosial (social Movement) adalah tipe paling penting dari salah satu perilaku kolektif (collective behavior), beberapa sosiolog menyebut gerakan sosial sebagai suatu bentuk dari tindakan kolektif (collective action) sebagai bentuk perilaku kolektif. Berpendapat bahwa gerakan sosial social movement berbeda dengan bentuk-bentuk perilaku kolektif behavior. Sementara terdapat juga sosiolog yang mengelompokkan gerakan sosial sebagai salah satu bentuk dari kolektif behavior.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Crossley perilaku kolektif merupakan salah satu dimensi dari studi Gerakan sosial yang berkembang di Amerika.<sup>12</sup>

Menurut Locher gerakan sosial menyatakan dari bentuk perilaku kolektif yang lainnya, seperti :crowd (kerumunan), riot (kerusuhan) dan rebel (penolakan, pembangkangan) dapat juga dilihat dari tiga aspek yakni : pengorganisasian, pertimbangan, daya tahan.<sup>13</sup>

Menurut Tarrow gerakan sosial adalah sebuah tindakan penentangan terhadap elite, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya terhadap pihak lawan, pihak berwenang menuju kearah tujuan kolektif maka bentuk pertarungan.

Menurut Greene gerakan sosial merupakan bentuk perilaku kolektif yang bertahan cukup lama terstruktur dan bersifat rasional tujuannya untuk mendukung

---

<sup>10</sup>St. Sularto, *Gerakan Sosial Romo Mangun*, 2017, Kompas Media Nusantara, Jakarta. Hal. XIII

<sup>11</sup>Oman Sukmana, *"konsep dan teori Gerakan Sosial"* intrans Publishing, 2016, Jawa Timur, hlm 1-2

<sup>12</sup>\*ibid

<sup>13</sup>\*ibid hlm 2.

mencegah suatu bentuk perubahan sosial, adanya struktur kepemimpinan dan suatu aktivitas yang dipertahankan cukup lama.<sup>14</sup>

Menurut Stolley gerakan sosial merupakan upaya pencapaian tujuan tertentu melalui tindakan yang menentang wewenang, budaya.<sup>15</sup>

## 1.2 Teori-Teori Gerakan Sosial

Berikut ini beberapa teori Gerakan Sosial:

### 1). Teori Perilaku atau aksi Kolektif

Teori tindakan Kolektif menurut David Peopene teori perilaku kolektif banyak berkonsentrasi pada kondisi-kondisi eksternal tindakan manusia dalam konteks keseluruhan sosial, yakni pada alasan-alasan sosial aksi masa.<sup>16</sup>

### 2). Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional memandang berbagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap lembaga-lembaga Negara, korporasi atau organisasi keagamaan dan sosial merupakan manifestasi sebuah tindakan individu-individu yang rasional dan dilakukan secara sadar untuk mengejar kepentingan individunya.<sup>17</sup>

### 3). Teori Perjuangan Kelas, Vanguard dan Hegemoni Budaya

Menurut Marx, masyarakat selalu terdiri dari dua kelompok besar, satu kelompok besar, satu kelompok menjadi penindas dan satu kelompok lainnya

<sup>14</sup>Oman Sukmana, *konsep dan teori Gerakan Sosial*, 2016 intrans publishing, Jawa Timur hlm 4

<sup>15</sup>\**ibid*, hlm 5

<sup>16</sup>Dr Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan praktek*, Cetakan II (Revisi) 2013, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 6-11

<sup>17</sup><sup>17</sup> \**ibid.*, Hal 11-17

menjadi yang ditindas. Karenanya ada kategori-kategori dalam masyarakat sebagai berikut orang bebas versus budak, bangsawan versus masyarakat desa, raja versus hamba sahaya, pemilik alat produksi versus buruh. Konsep perjuangan kelas Karl Marx ini menemppatkann aksi-aksi kolektif dalam bentuk revolusi, gerakan sosial, dan politik perlawanan merupakan rangkaian tindakan dari sebuah kelompok masyarakat yang rasional untuk keluar dari situasi buruk dari penindasan.<sup>18</sup>

#### 4). Teori Gerakan Sosial Modern

Pada periode 1960-an, perkembangan teori gerakan sosial memasuki era baru dalam dunia akademis terutama di Negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat. Sebuah era yang ditandai dengan ditransformasikannya teori gerakan klasik menjadi lebih modern dengan mempergunakan teori-teori yang telah dikembangkan oleh akademisi teori gerakan sosial sebelumnya.

#### 5). Teori Keluhan

Mempelajari gerakan sosial dan berbagai bentuk politik perlawanan lainnya. Teori keluhan ini juga dipergunakan untuk menjembatani perdebatan para ahli gerakan sosial dalam menganalisa pemicu utama gerakan sosial dari bingkai produk berbagai bentuk eksploitasi, ketidakadilan dan ketimpangan, yaitu keluhan. Lebih dari beberapa dasawarsa, terutama para ahli gerakan sosial yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, mengamati fenomena gerakan sosial

---

<sup>18</sup>Dr Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan praktek*, Cetakan II (Revisi) 2013, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Hal 17-23

hanya terjadi ketika relasi mengalami ketimpangan antara kelas buruh dan para pemilik alat produksi atau yang kita kenal dengan kaum burjuis.<sup>19</sup>

#### 6). Teori proses politik

Proses politik berperan dalam gerakan situasi sosial politik dalam masyarakat merupakan keberpihakan Negara kepada kepentingan public, atau teranalisasinya publik dari perhatian Negara.<sup>20</sup>

Secara lebih spesifik, struktur kesempatan politik ini didukung oleh beberapa variabel, antara lain:

1. Ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan
2. Ketika keseimbangan politik sedang labil, sedangkan keseimbangan baru belum terbentuk
3. Ketika terjadi konflik antar elit politik, sehingga keadaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh parapelaku perubahan sebagai kesempatan
4. Ketika para pelaku perubahan digandeng oleh elit-elit yang berada di dalam sistem untuk melakukan perubahan.<sup>21</sup>

### 1.3 Cakupan Gerakan Sosial

---

<sup>19</sup>Dr Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan praktek*, Cetakan II (Revisi) 2013, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 25-31

<sup>20</sup>Suryani Amin, *Gerakan petani dalam sejarah lokal di Kabupaten Batang*, 2008 Hal. 7

<sup>21</sup>\**ibid*,

Gerakan sosial yang beragam ini dapat disederhanakan dan tipologikan dilihat dari “besarnya perubahan sosial yang dikehendaki” (skala) dan “tipe perubahan yang dikehendaki” menurut tipologi David Aberle

Besaran	Tipe	
	Perubahan Perorangan	Perubahan Sosial
Sebagian	<i>Alternative Movements</i>	<i>Reformative Movements</i>
Menyeluruh	<i>Redemptive Movements</i>	<i>Transformative Movements</i>

*Alternative Movements* berupaya mengubah sebagian perilaku orang.

*Redemptive Movements* mencoba mengubah perilaku perorangan secara menyeluruh, seperti dalam bidang keragaman.

*Reformative Movements* mencoba mengubah masyarakat namun dengan ruang lingkup yang terbatas, seperti gerakan perempuan.

*Transformative Movements* adalah gerakan yang mencoba mengubah masyarakat secara menyeluruh.<sup>22</sup>

#### 1.4 Gerakan Sosial Petani, Perspektif Teoretik

Gerakan yang cocok untuk permasalahan ini adalah gerakan petani, karena yang melakukan aksi protes adalah kelompok warga masyarakat yang mayoritas bekerjanya sebagai petani. Gerakan petani dikembangkan oleh Scottian dari studi yang ia lakukan di Malaysia dimana perlawanan petani merupakan suatu gerakan

<sup>22</sup>Darmawan Triwibowo, “Gerakan Sosial: Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat”, Jakarta Agustus 2006, hlm xviii-xix.

tanpa organisasi formal dan dipelopori oleh para petani miskin. Perlawanan di komunikasikan secara non formal, serangan dilakukan secara diam-diam dan dalam skala kecil. Para petani melakukan perlawanan secara terus menerus dengan melakukan pembakangan-pembangkangan kecil seperti terlambat datang, menghilangkan peralatan, mencuri hasil panen, berpura-pura tidak datang dengan berbagai alasan seperti sakit, acara keluarga dsb.<sup>23</sup>

Scott mengungkapkan para petani terancam kehilangan tanah, keuntungan dan status sosial karena penetrasi modal besar yang masuk ke kampung-kampung. Kebijakan pemerintah yang pro terhadap modal besar telah mengguncang struktur sosial di desa, sehingga para petani tersebut melakukan perlawanan. Hasil studi Scott menjadi menarik karena perlawanan tersebut tidak melalui organisasi formal, terstruktur, melibatkan resources besar tetapi justru perlawanan-perlawanan yang mengambil bentuk-bentuk perlawanan kecil.<sup>24</sup>

Sementara itu menurut Popkin perlawanan petani tidak selalu ditujukan menentang kebijakan negara karena banyak kebijakan Negara seperti revolusi hijau menguntungkan petani tetapi perlawanan petani ditunjukkan menentang elit-elit desa yang kaya yang mengklaim mewakili kepentingan para petani padahal lebih kepada mempertahankan kepentingan para elit desa itu sendiri. Dengan kata lain para petani di pergunakan oleh elit desa untuk menentang kebijakan Negara yang akan mengganggu dan menghancurkan kepentingan elit-elit desa.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Dr. Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial : teori dan praktik*, pustaka pelajar, Yogyakarta, edisi cetakan II, hlm 79-81

<sup>24</sup> <sup>24</sup> *ibid*, hlm 79-81

<sup>25</sup> *ibid*, hal 79-81

Seharusnya dibutuhkan koordinasi antara lembaga terkait mulai dari pusat, Propinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan atau Desa dan jaminan tidak adanya korupsi / penyimpangan di tingkat pelaksanaan ini merupakan masalah yang seharusnya ada di dalam sebuah kebijakan pemerintah. Dengan berbagai keunggulan yang sangat komperatif yang dimiliki di Indonesia harus memiliki sebuah keuntungan, karena tidak cukup hanya masalah pertanian karena lebih dari 70% persoalan yang strategis dalam bidang ini justru ada di luar dominan dalam sektor pertanian. Di tingkat petani ada persoalan rendahnya SDM (sumber Daya Manusia), kelembagaan, dan pendampingan untuk alih dalam pengetahuan yang kurang. Departemen Pertanian menyebutkan sebelum diterapkan Desentralisasi jumlah penyuluh tercatat 36.626 orang. Namun seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 2003 jumlah tersebut berkurang menjadi 19.636. pemerintah dan DPR telah berupaya mengatasi permasalahan yang di alami oleh para petani.<sup>26</sup>

Bentuk perlawanan seperti itu sangat sesuai dengan karakteristik petani yang lemah karena tidak banyak membutuhkan koordinasi atau perencanaan. Bahkan lebih merupakan bentuk usaha untuk menolong diri sendiri dan secara tipikal menghindari tiap konfrontasi dengan penguasa atau norma-norma elite. Scott menjelaskan perbedaan antara perlawanan sungguh-sungguh dengan perlawanan yang bersifat insidental. Dalam hal ini terdapat lima teknik yang acap dipergunakan petani dalam rangka meminimalisasi kerugian yang mungkin akan di deritanya.

---

<sup>26</sup>Mufid A. Busyari, "Republik salah urus" RMBOOKS, Graha Pena Jakarta, 2008 , hlm 10-11

1. Petani tidak menggunakan organisasi formal, karena itu wajar jika kebanyakan bentuk perlawanan petani tersebut tidak terencana dan tidak sistematis.
2. Melakukukan perlawanan secara diam-diam, mereka cenderung merahasiakan segala aktivitasnya rapat-rapat, tidak melakukan konfrontasi langsung dengan kekuasaan, ataupun menunjukkan penolakan pemerintah yang simbolis terhadap struktur kekuasaan yang ada.
3. Petani mempertahankan bentuk perlawanan mereka pada skala kecil, untuk menghindari kerugian organisasi yang berlebihan terhadap mobilisasi. Scott berpendapat bahwa bentuk perlawanan petani “harus disertai dengan tingkat kerja sama diam-diam yang cukup tinggi antar golongan resistor.
4. Petani menutupi perlawanan mereka dengan menjalankan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi, rahasia, dan dilakukan pada malam hari.<sup>27</sup>

Dengan demikian bentuk perlawanan harian petani berakar pada institusi-institusi yang kooperatif, informal, tanpa deklarasi, berskala kecil, dan bersifat rahasia. Karakteristik semacam ini sesuai dengan kebutuhan kaum petani, karena karakteristik tersebut dapat menekan kerugian adanya insentif selektif, yaitu kerugian yang harus mereka bayar di bawah tekanan ekonomi dan represi politik. Menurut scott, tujuan sebagian besar perlawanan petani bukanlah secara langsung mengubah sistem dominasi yang mapan, melainkan lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk tetap hidup dalam sistem itu.

---

<sup>27</sup>Dr. Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial : teori dan praktik*, pustaka pelajar, Yogyakarta, edisi cetakan , hal. 79-81

Dari definisi Scott di atas, ada tiga hal yang perlu dijelaskan: *pertama*, tidak ada keharusan bagi perlawanan untuk mengambil aksi bersama, *kedua*, perlawanan merupakan masalah yang sangat pelik, *ketiga*, definisi ini mengakui apa yang dinamakan perlawanan simbiolis atau ideologis (misalnya gossip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan, penarikan kembali sikap hormat) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlawanan berdasarkan kelas.

Di mata petani miskin kewajiban-kewajiban ekonomi kaum elite adalah memperhatikan kebutuhan petani, menyesuaikan tuntutan mereka akan tenaga kerja dan padi dalam kondisi-kondisi tahunan, dan menyediakan pangan di musim paceklik. Kekuatan moral dan harapan-harapan ini digaris bawahi oleh kemarahan dan tindakan kekerasan yang pada umumnya diakibatkan oleh pelanggaran kewajiban-kewajiban itu.<sup>28</sup>

## **2. KEBIJAKAN PEMERINTAH**

### **1.1 Definisi kebijakan Pemerintah dan Definisi kebijakan Publik**

Kebijakan pemerintah adalah hasil proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan Negara yang mencakup langkah-langkah dalam upaya-upaya yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara Negara oleh karena itu, keterkaitan dalam kebijakan pemerintah tidak terlepas dari peran atau fungsi aparatur pemerintahan yang disebut birokrasi.

---

<sup>2828</sup> Dr. Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial : teori dan praktik*, pustaka pelajar, Yogyakarta, edisi cetakan II, hlm 79.

<sup>29</sup> sedangkan Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat bagi orang banyak tata aturan strategis atau bisa disebut bergaris besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari orang banyak umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak, dan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.<sup>30</sup>

Sedangkan pengambilan keputusan konsep yang menyangkut suatu keputusan-keputusan yang memiliki tujuan yang mengikat untuk masyarakat, dan dapat pula untuk mencapai tujuan itu. Dalam setiap proses membentuk sebuah kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan sebuah pemerintah.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Janji Nawa Cita yang digulirkan pemerintahan Jokowi dan Wakil presiden Jusuf Kalla belum seluruhnya terealisasi, sementara roda pemerintahan yang baru sudah hampir setengah berjalan, pemerintah memang sudah membuat berbagai terobosan seperti perbaikan birokrasi, penegakan hukum, pembangunan infrastruktur dan berbagai kebijakan yang prorakyat.<sup>32</sup>

Menurut penjelasan Presiden Jokowi pada bulan akhir maret tahun 2017, pemerintah terus mematangkan rencana kebijakan dalam mengatasi ketimpangan sosial yang sampai saat ini masih menjadi persoalan besar. Ratio

---

<sup>29</sup>Drs. Herabudin, M.si, *studi kebijakan pemerintah*, pustaka setia Bandung 2016, hlm 37.

<sup>30</sup>\**ibid*, hlm 184.

<sup>31</sup>Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm 18.

<sup>32</sup>St Sularto, *Gerakan Sosial Romo Mangan*, kompas media nusantara, Jakarta 2017, hlm XI

Gini di Indonesia pada tahun 2016 mengalami penurunan 0,4 sampai 0,39 tetapi angka itu masih menunjukkan adanya ketimpangan-ketimpangan yang cukup besar. Ada tiga sektor dalam kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan, retribusi asset, akses keuangan, dan permodalan, dan peningkatan sumber daya manusia.<sup>33</sup>

## 2.2 Ciri-ciri kebijakan Pemerintah

Ciri-ciri yang melekat pada kebijakan pemerintah bersumber kepada orang-orang yang memiliki wewenang dalam system politik yang membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan pemerintah.<sup>34</sup>

Pemerintah dapat menempuh kebijakan yang sangat liberal dalam hal campur tangan, baik kepada seluruh maupun sebagian sektor kehidupan, kebijakan pemerintah dalam bentuk yang positif berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Menurut David Easton, kebijaksanaan memiliki wewenang dalam system politik, yaitu para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrasi, dsb.<sup>35</sup>

## 2.3 Menurut Reza A.A Wattimena yang diperhatikan dalam pembuatan kebijakan publik yaitu:

- 1). Isi kebijakan publik yang dibuat, yaitu kebijakan publik, terutama dalam masyarakat demokratis harus dibuat dengan berpijak pada penelitian-pennelitian bermutu yang telah ditentukan sebelumnya.

<sup>33</sup>St Sularto, *Gerakan Sosial Romo Mangun*, Kompas media nusantara, Jakarta 2017, hlm XI

<sup>34</sup>. Herabudin, M.Si, *"Studi kebijakan Pemerintah"*, Bandung:Pustaka Setia, 2016, hlm 31-32

<sup>35</sup>\*ibid, hlm 33.

2). Proses dari pembuatan kebijakan publik harus terbuka untuk publik dan dibuat melalui proses diskusi ataupun konsultasi dari masyarakat sekitar, terdiri atas:

- a). orang-orang yang otonom, yaitu mampu mengatur dirinya sendiri,
- b). konsep demokrasi yang radikal, terjadi pada setiap orang yang diajak ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik,
- c). berdiri di atas fondasi dasar bahwa setiap orang adalah manusia yang otonom , yaitu mampi membuat keputusan, dan mengontrol dirinya sendiri,
- d). bekerja sama untuk membuat kebijakan publik yang baik untuk kepentingan bersama

menurut Hegel hukum yang ada di masyarakat tidak pernah identik dengan moralitas, merupakan pandangan yang berada dalam hati individu, ketika setiap orang mampu menentukan dan mengatur dirinya sendiri tidak identik dengan hal-hal yang terjadi di luar dirinya, yaitu masyarakat.

#### **2.4 Prinsip-prinsip kebijakan pemerintah**

Kebijakan dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho, yaitu:

- i. Merumuskan kebijakan pemerintah (formulasi kebijakan)
- ii. Mengiimplentasikan kebijakan pemerintah tersebut
- iii. Mengevaluasi kebijakan pemerintah tersebut.

#### **3 kriteria Penentuan kebijakan pemerintah**

menurut Said Zainal Abidin ada beberapa kriteria penentuan kebijakan pemerintah, yaitu sebaagai berikut:

- a. Efektivitas, yaitu mengukur alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan,
- b. Efisien, yaitu dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, yaitu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada,
- d. Adil
- e. Terjawab, yaitu kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan suatu golongan atau masalah tertentu dalam masyarakat.
- f. Aktivitas analisis dalam kebijakan pemerintah terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain, oleh karena itu, dalam kebijakan pemerintah terlihat gambaran disiplin ilmu dalam kebersamaan.

Pada praktiknya kebijakan pemerintah mengembangkan mekanisme jaringan aktor. Melalui mekanisme jaringan aktor, tercipta jalur-jalur informal, dalam mengatasi persoalan-persoalan susah untuk dipecahkan.<sup>36</sup>

### **2.5 pembangunan di Bidang Politik**

Bertujuan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam suatu aktivitas di bidang pembangunan sehingga menciptakan sebuah kekuatan. Pertama kekuasaan dilakukan oleh kaum politisi untuk menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan dari berbagai jenis pembangunan lebih banyak dan ditentukan oleh kekuasaan politik, kedua kekuatan yang tercipta dalam pelaksanaan pembangunan

---

<sup>36</sup> Drs. Herabudin, M.Si, "*Studi kebijakan Pemerintah*", Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm 40.

yang dilakukan oleh kaum birokrasi yang mengatasnamakan publik hanya untuk memenuhi kebijakan dan kesejahteraan rakyat.<sup>37</sup>

Orientasi pembangunan politik seperti ini tidak menyejahterakan masyarakat, tetapi justru semakin menyerasakan masyarakat masyarakat dalam kemiskinan, terutama pada masyarakat pada level bawah secara individual. Kenyataan ini jadikan isu sentral bagi politik untuk menciptakan propaganda kepada golongan masyarakat tersebut dalam menjadikan aksi politiknya. Para pemimpin jabatan politik yang bersumber dari politik tidak lagi memiliki hati nuranu yang memperjuangka kepentingan masyarakat, sehingga pemikiran dan tindakannya lebih berorientasi untuk memenuhi kepentingan pribadi masing-masing.<sup>38</sup>

## **i. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian (Kualitatif, Pendekatan Deskriptif)**

#### **a. Pengertian Penelitian Kualitatif**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif, strategi dan model yang dikembangkan sangat beragam.

Penelitian kualitatif berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam kehidupannyasehari-hari secara komprehensif dan rinci diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang

---

<sup>37</sup>Dr. Adonn Nasrullah Jamaludin, M.ag, *Sosiologi pembangunan*, Bandung, Pustaka Setia, 2016, hlm 14.

<sup>38</sup>\**ibid*, hlm 15.

ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula.<sup>39</sup>

b. Pendekatan deskriptif

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.<sup>40</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah yang digunakan adalah setting atau tempat penelitian. Tempat penelitian di kantor kepala desa Wungurejo, kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

---

<sup>39</sup>Dr. Basrowi, M.Pd & Suwandi, M.Si, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 20 dan Hal 23

<sup>40</sup>\**ibid* hal. 28

### 3. Jenis dan Sumber Data ( Primer dan Sekunder)

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Warga Petani Desa Wungurejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.<sup>41</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data (wawancara, observasi, dokumenter)

#### a. Pengamatan (Observasi)

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

---

<sup>41</sup>Dr. Basrowi, M.Pd & Suwandi, M.Si, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta hal. 169

Observasi sebagai teknik pengambilan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan angket. Kalau wawancara dan angket selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu wawancara (interview) sebagai pengaju/ pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawancara menurut Lincoln dan Guba antara lain: Mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang, merevifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) yang di kembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.<sup>42</sup>

Dalam Penelitian ini yang di wawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa / Pemerintah Desa
2. Koordinator demo
3. Warga, Meliputi 1 Orang (Warga Desa Wungurejo yang bekerjanya sebagai petani dan yang terkena proyek jalan tol, akan tetapi beliau mengajukan ke koordinator Demo.

---

<sup>42</sup>Dr. Basrowi, M.Pd & Suwandi, M.Si, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta hal 127-128.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks, presentasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, dsb.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>43</sup>

### 5. Teknik Analisis Data Kualitatif

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman kegiatan yang bersamaan:

- Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal misalnya : melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan

---

<sup>43</sup>Dr. Basrowi, M.Pd & Suwandi, M.Si, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta hal 158-159.

pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain.

## **ii. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis membagi menjadi empat bab, Dimana di setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Dan di setiap sub bab terdapat pemaparan yang menjelaskan tentang judul penelitian, adapun Sistematika Penulisan penelitian ini sebagai berikut :

Bab I merupakan bab Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian meliputi: (Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Observasi, wawancara, dan Observasi). Dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisikan mengenai Gambaran Umum Desa Wungurejo kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal, Gambaran Umum dalam penelitian ini yaitu mengenai Gambaran Umum Desa Wungurejo kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal yang meliputi letak geografis, sejarah Desa Wungurejo, Demografi Desa Wungurejo, visi dan Misi Desa Wungurejo, pembagian Wilayah Administratif, keadaan sosial masyarakat, Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Wungurejo, dan Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wungurejo kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal

Bab III merupakan bab yang memaparkan Gerakan Protes Masyarakat Desa Wungurejo kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal dalam pembebasan lahan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Batang-Semarang tahun 2016.

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dan akan memberikan beberapa saran untuk Gerakan aksi pembebasan Demo jalan Tol yang menghubungkan Batang-Semarang pada tahun 2016.

